

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO

2021



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO

2021



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO 2021

ISSN: 2656-9256

Nomor Publikasi: 72040.2126

Katalog: 4102002.7204

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 74 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso

Pencetak:

UD. Rio

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Rantau, SE

Penanggung Jawab Teknis:

Rantau, SE

Editor:

Lukman Khakim, SST

Penulis dan Pengolahan Data:

Afifah Fakhrunnisaa', S.Tr.Stat

Desain/Layout:

Afifah Fakhrunnisaa', S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia merupakan hal yang sangat penting untuk diukur dan menjadi acuan dalam pembangunan daerah jangka panjang. Banyak indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kondisi ekonomi. Publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso 2021 ini menggambarkan perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Poso tahun 2021.

Publikasi ini merupakan hasil kegiatan dari penelitian lapangan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama, pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting karena inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini.

Selanjutnya melalui publikasi ini semoga dapat membantu proses penyusunan perencanaan, berguna dan bermanfaat bagi semua pihak dalam memberikan informasi dalam hal perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Poso, Agustus 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Poso



Rantau, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN.....	6
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB 2 METODOLOGI.....	10
2.1. DEFINISI IPM.....	10
2.2. KOMPONEN IPM.....	16
2.3. FUNGSI DAN KETERBATASAN IPM.....	18
2.4. STATUS IPM.....	19
2.5. KECEPATAN IPM.....	20
BAB 3 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO.....	21
3.1. PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO.....	21
3.2. STATUS IPM KABUPATEN POSO.....	26
BAB 4 INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO.....	27

4.1. INDEKS KESEHATAN	27
4.2. INDEKS PENDIDIKAN.....	35
4.3. INDEKS PENGELUARAN	48
4.4. KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021	57
BAB 5 PENUTUP.....	62
5.1. KESIMPULAN	62
5.2. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	7
Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia	20
Tabel 3.1. IPM Kabupaten Poso ju, 2012-2021	23
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2018-2021	31
Tabel 4.2. Jumlah Sekolah di Kabupaten Poso, 2015-2021	43
Tabel 4.3. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2020-2021	44
Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kabupaten Poso, 2021.....	46
Tabel 4.5. Struktur Perekonomian Kabupaten Poso 2021**	52
Tabel 4.6. Perkembangan PDRB Per Kapita dengan Kabupaten Poso (ribu rupiah), 2017-2021	54
Tabel 4.7. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Dirinci Menurut Kabupaten/Kota 2021	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perubahan Metodologi IPM.....	13
Gambar 3.1. Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Poso Tahun 2012-2021	25
Gambar 4.1. Indeks Penyusun IPM.....	28
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Poso, 2012-2021	29
Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Poso, 2021	33
Gambar 4.4. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Poso (tahun), 2012-2021.....	37
Gambar 4.5. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun), 2010-2021	39
Gambar 4.6. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Riil Per Kapita (000 rupiah) Kabupaten Poso, 2010-2021 ...	49
Gambar 4.7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Poso, 2011- 2021 (persen).....	52
Gambar 4.8. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 2021	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada dua dekade terakhir ini, banyak kajian yang dilakukan oleh dunia internasional terkait dengan manusia sebagai objek dan tujuan utama dalam pembangunan. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dimana sebelum tahun 1990-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP). Faktanya, masih dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas manusianya dan sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selain

itu dilanjutkan dengan bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Pada tahun 1990, *United Nation Development Programme* (UNDP) mengeluarkan sebuah indeks komposit yang mengukur perkembangan manusia, yaitu *Human Development Index* (HDI) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan. Sedangkan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur standar hidup layak.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori *Cobb-Douglas*). Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Demi memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia yang

dapat ditafsirkan juga sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya melihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebab hal tersebut baru memenuhi syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi suatu daerah sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi daerah itu harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan daerah. Dengan pemerataan pembangunan daerah terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan daerah.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi- potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antar-wilayah semakin bergairah menuju ke arah yang lebih baik. Namun perlu disadari, perubahan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan tetapi secara bertahap sesuai dengan proses kebijakan yang berjalan. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Dengan adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan yang bermuatan kearifan lokal, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antar kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Seperti contoh wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding daerah lain disekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak pada berpindahnya penduduk yang berkualitas ke-kota. Sebagai konsekuensinya, daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah.

Tujuan utama pemerintah Kabupaten Poso adalah mencapai pembangunan manusia Kabupaten Poso seutuhnya dan pembangunan masyarakat Kabupaten Poso seluruhnya. Hal ini diwujudkan dengan memfokuskan perhatian pembangunan daerah Kabupaten Poso pada manusia sebagai titik sentral yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu tersendiri.

Untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Poso, tentunya dibutuhkan masyarakat yang tidak hanya unggul dari segi kuantitas, tetapi juga maju dari segi kualitas. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek

intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah daerah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Kabupaten Poso yang berkualitas.

Saat ini tampaknya pemerintah daerah sangat perhatian dengan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Selain digunakan untuk penghitungan anggaran, pencapaian hasil dalam pembangunan manusia terkait pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk memonitor kinerja pembangunan daerah.

Dengan disusunnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah berimplikasi pada munculnya hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran, yaitu dari sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Dampak yang berlangsung dirasakan ialah tanggung jawab atas sebagian besar kegiatan pembangunan dilimpahkan ke daerah, termasuk dalam hal pembangunan manusia.

Meningkatnya kesadaran akan demokrasi, desentralisasi menjadi salah satu pilihan dalam upaya menggerakkan roda pembangunan. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antar wilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antar kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Poso.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan permasalahan strategis yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia serta masukan bagi pemerintah daerah sebagai alat bantu perencanaan (*planning tool*) pembangunan yang lebih mengakomodasi dimensi pembangunan manusia. Misalnya melalui peningkatan anggaran pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat pra sejahtera agar dapat mandiri secara ekonomi.

1.2. TUJUAN

Secara umum, publikasi ini untuk menyiapkan perangkat yang digunakan agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah, sehingga mencapai sasaran sebagaimana ditentukan, dengan demikian kegiatan ini bertujuan: menyiapkan basis data, indikator dan indeks yang memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan manusia guna melengkapi data basis atau

digunakan untuk mengungkap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Poso.

Adanya pemahaman bersama pentingnya berbagai indikator dan indeks pembangunan manusia (IPM) dan implikasinya terhadap kebijaksanaan dan program pembangunan secara menyeluruh. Memberikan masukan kepada para penentu kebijakan untuk menyusun dan mengarahkan kegiatan pembangunan yang lebih tepat di masa mendatang. Agar tujuan dari studi ini dapat dicapai secara optimal, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjarak dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Tersedianya IPM Kabupaten Poso dan indikator yang relevan.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini yaitu pendahuluan berisi latar belakang, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang akan menguraikan gambaran awal mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan pada subbab tujuan penulisan akan menguraikan tujuan dari penulisan buku publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2021 ini. Subbab terakhir adalah sistematika penulisan yang menguraikan garis besar dari bab dan subbab yang dibahas dalam buku publikasi ini.

BAB II METODOLOGI

Bab kedua ini terdiri dari 5 subbab yaitu pengertian indikator, definisi IPM, metodologi IPM, komponen IPM, status IPM, dan kecepatan IPM. Pengertian indikator akan menguraikan apa yang dimaksud dengan indikator dan penjelasan mengenai beberapa kategori indikator. Definisi IPM akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan IPM. Sedangkan sumber data IPM akan menguraikan sumber data-data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Subbab komponen IPM akan menguraikan komponen-komponen dan indikator-indikator yang digunakan sebagai pembentuk IPM. Subbab kecepatan IPM akan membahas penghitungan kecepatan IPM. Pada Subbab status IPM akan menguraikan klasifikasi IPM berdasarkan nilainya. Dan yang terakhir subbab manfaat IPM akan menjelaskan manfaat atau fungsi dari IPM itu sendiri.

BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO

Pada bab ketiga ini akan terdiri dari empat subbab. Subbab pertama yaitu pembangunan manusia Kabupaten Poso yang akan menguraikan tentang perkembangan IPM di Kabupaten Poso selama tahun 2017-2021, kecepatan IPM dan status IPM. Subbab kedua yaitu dimensi kesehatan Kabupaten Poso akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi kesehatan di Kabupaten Poso selama tahun 2017-2021. Sedangkan subbab ketiga yaitu dimensi pendidikan Kabupaten Poso akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi pendidikan di Kabupaten Poso selama tahun 2017-2021. Dan

yang keempat yaitu subbab dimensi standar hidup Kabupaten Posoyang akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi standar hidup di Kabupaten Poso selama tahun 2017-2021.

BAB IV PERBANDINGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH

Bab empat terdiri dari empat subbab. Subbab pertama yaitu pembangunan manusia antarwilayah di Sulawesi Tengah yang akan menguraikan tentang perkembangan IPM kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama tahun 2021, status IPM, kecepatan IPM, dan selisih IPM. Subbab kedua yaitu dimensi kesehatan antar-wilayah di Sulawesi Tengah akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi kesehatan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama tahun 2021. Sedangkan subbab ketiga yaitu dimensi pendidikan antarwilayah di Sulawesi Tengah akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi pendidikan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama tahun 2017-2021. Dan yang keempat yaitu subbab dimensi standar hidup antarwilayah di Sulawesi Tengah yang akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi standar hidup di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama tahun 2021.

BAB 2

METODOLOGI

2.1. DEFINISI IPM

Pada hakekatnya, manusia secara individual dan masyarakat secara kolektif merupakan sasaran dari proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dari kondisi sebelumnya. Dan untuk menciptakan perbaikan mutu hidup tersebut, berawal dari konsep perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pembangunan manusia dalam konteks perencanaan pembangunan bukanlah dalam konsep yang sempit atau bagi sekelompok orang atau masyarakat tertentu, tetapi mencakup segenap lapisan masyarakat. Olehnya konsep pembangunan manusia lebih mengarah pada aspek pemerataan dalam pemenuhan segenap kebutuhan hidup.

Sebagaimana dituangkan dalam konsep delapan jalur pemerataan mengandung unsur-unsur peluang berusaha, peluang bekerja yang menghasilkan jalur ketiga yakni kecukupan tingkat penghasilan. Jalur tingkat penghasilan ini pula membuka peluang kecukupan pangan, sandang dan kesehatan. Tiga jalur lainnya yang mencakup partisipasi masyarakat mulai dari peluang berusaha, bekerja sampai mengenyam hasilnya seperti pemerataan pembangunan antar daerah dan pelayanan hukum dalam berusaha, bekerja dan memperoleh nafkah yang layak merupakan cakupan lima jalur pemerataan.

Bertolak dari konsep jalur pemerataan tersebut (meskipun kenyataan belum dapat diaktualisasikan hingga saat ini) dapatlah terungkap bahwa delapan jalur pemerataan sudah merupakan ramuan indikator sosial ekonomi (kesejahteraan rakyat). Meskipun demikian, penyajian indikator ini masih dilakukan dalam seri terpisah, padahal sesungguhnya indikator tersebut masih dapat di sajikan secara lengkap dalam satu set indeks pembangunan manusia atau dengan kata lain dapat dipadukan menjadi indikator majemuk (komposit) atau indeks yang menyatukan beberapa indikator.

Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) yang pertama pada tahun 1990 mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.

Status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990) ukuran umum yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang dapat mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah dalam tiga dimensi indikator komponen pilihan dasar yaitu :

1. Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir.
2. Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata-rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) per kapita.

Indikator IPM yang dipilih cukup sensitif dan dapat berperan sebagai refleksi tentang fenomena perkembangan manusia. Dalam pemilihan indikator mendasarkan pada pendekatan masukan (*input*) dan pendekatan hasil (*output*). Pendekatan masukan sebagai variabel yang mempengaruhi dan pendekatan hasil sebagai variabel yang dipengaruhi. Indikator yang dipengaruhi disebut sebagai indikator inti dan indikator yang mempengaruhi disebut sebagai indikator sektoral.

Sejak awal diluncurkan di tahun 1990 hingga 2014, metodologi penghitungan IPM sudah beberapa kali mengalami perubahan. Jika di tahun 1990, komponen yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Anak Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dimana untuk menghitung ketiga dimensi tersebut menjadi indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik. Pada tahun 2010, UNDP mengubah komponen yang digunakan yaitu: AHH, Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan lama sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dengan perhitungan yang semula menggunakan rata-rata aritmatik, berubah menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metode penghitungan IPM sebagaimana disajikan pada gambar 2.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.1 Perubahan Metodologi IPM

Dalam penghitungan IPM tahun 2014 BPS secara nasional melaksanakan upgrading metodologi penghitungan Angka IPM, hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain :

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi (mendekati 100%), sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan yang terjadi adalah pada indikator yang mendasari perhitungan IPM dan metode agregasi penghitungan yang digunakan. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan PDRB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Sedangkan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan perubahan ini diharapkan dapat menjadi indeks yang diskriminatif (dapat membedakan kondisi antar daerah dengan baik). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara PNB menggantikan PDB/PDRB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kemudian perubahan dalam metode agregasi lebih memungkinkan untuk mencapai pembangunan manusia yang baik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dimensi dasar saja tetapi ketiga dimensi dasar tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{\text{pengadaan}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

2.2. KOMPONEN IPM

Dengan metode penghitungan yang baru maka data-data yang dapat diimplementasikan dalam metode penghitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Proyeksi Penduduk.
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di peroleh dari sumber data hasil (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS merujuk pada 96 komoditas dari sebelumnya hanya 27 komoditi.
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali pengeluaran per kapita sebagai refleksi hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, UNDP menetapkan Nilai Maksimum dan Minimum untuk masing-masing indikator yang juga menjadi acuan BPS dalam menghitung IPM hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Standar nilai untuk menghitung IPM disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Komponen IPM	Nilai*		Keterangan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Paritas Daya Beli (rupiah)	26.572.352 ^{a)}	1.007.436 ^{a)}	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

^{a)} daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten (Jaksel) yang diproyeksikan hingga 2025

^{b)} daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (Tolikara)

^{*} Nilai maksimum dan minimum sesuai dengan ketentuan UNDP (1994;108) kecuali untuk *Purchasing Power Parity (PPP)*

Penetapan nilai tersebut memberikan keuntungan antara lain bahwa angka IPM yang dihasilkan :

- Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat).

- Dapat diletakkan dalam skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4 komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

2.3. FUNGSI DAN KETERBATASAN IPM

Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu suatu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) angka kematian bayi (IMR), (2) angka harapan hidup umur satu tahun (el), dan (3) angka melek huruf (lit). Salah satu kritik mendasar terhadap IMH, bahwa dua komponen utama kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti pembuktian kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili salah satu saja. Kelemahan inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya indikator IPM.

Sebetulnya IPM juga masih mempunyai kelemahan sebagaimana terkandung pada IMH, yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas data yang digunakan antar negara sangat

beragam sehingga yang bersifat umum dari satu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Atau dengan kata lain, IPM suatu wilayah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), tidak banyak mempunyai makna apabila tidak dibandingkan dengan IPM wilayah lainnya.

Dibalik kelemahan sebagaimana di uraikan di atas, fungsi IPM sebagai alat advokasi diakui secara luas. *Statistic Intitute for Asia and The Pasific* (SIAP) mengkomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM “yang cocok” untuk perbandingan antara wilayah dalam suatu negara. Rekomendasi SIAP tersebut cukup realistis karena konsep/definisi sistem perstatistikan dalam suatu negara pada umumnya seragam sehingga kualitas data yang dihasilkan tidak berbeda. Dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak mencakup aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Namun demikian, sebagai suatu upaya dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari pembangunan, indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya upaya pemberdayaan melalui pengentasan kemiskinan pasca otonomi daerah, peningkatan kualitas SDM dan partisipasi penduduk dalam pembangunan manusia.

2.4. STATUS IPM

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah

bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

2.5. KECEPATAN IPM

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat kemajuan pembangunan manusia. Aspek yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia tersebut selain membandingkan antar wilayah atau posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM adalah mengkaji/mengukur kecepatan perkembangan IPM dengan menggunakan ukuran pertumbuhan per tahun.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM.

Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cara penghitungan “Pertumbuhan IPM” dinyatakan dengan rumus:

$$\left[\frac{IPM_{(t)} - IPM_{(t-1)}}{IPM_{(t-1)}} \cdot 100\% \right]$$

Dimana :

$IPM_{(t)}$: IPM suatu wilayah pada tahun ke –t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun ke (t-1)

BAB 3

PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO

3.1. PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO

Pembangunan manusia merupakan isu yang strategis sehingga capaiannya perlu dipantau. Dalam rangka memonitor pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dengan penyesuaian beberapa indikator sesuai ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota.

IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan manusia di Kabupaten Poso, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta

standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 3.1. IPM Kabupaten Poso Menurut Komponen, 2012-2021

Indikator	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia	66,20	66,94	67,65	68,13	68,83	69,78	70,68	71,40	71,28	71,45
[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	69,96	69,98	69,99	70,09	70,13	70,16	70,51	70,85	71,18	71,19
[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,21	12,39	12,87	13,15	13,16	13,38	13,68	13,69	13,70	13,71
[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,37	8,42	8,49	8,52	8,67	8,81	9,04	9,36	9,41	9,5
[Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	7430	7768	7869	7971	8345	8781	8936	9084	8808	8850

Sumber: BPS Kabupaten Poso

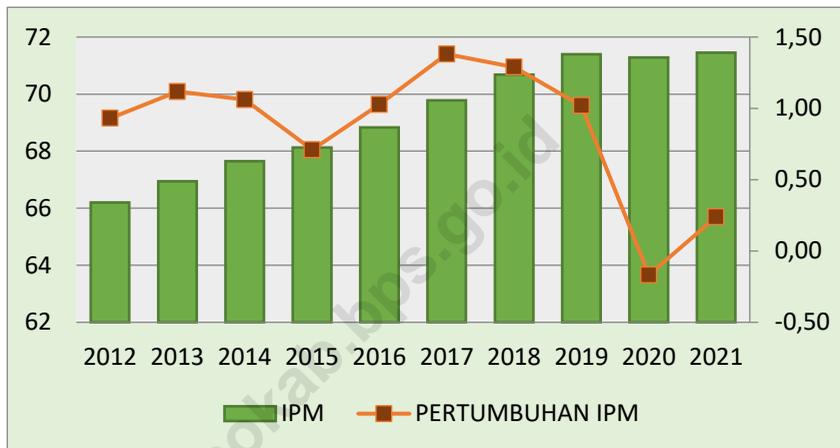
IPM dan komponennya dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 pembangunan manusia di

Kabupaten Poso memperlihatkan tren positif. Meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun tidak signifikan.

Berdasarkan penghitungan dengan metode baru, tercatat IPM Kabupaten Poso tahun 2012 adalah 66,2. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 71,28 dan naik menjadi 71,45 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan pengeluaran per kapita dibanding tahun sebelumnya mengakibatkan nilai IPM menurun pada 71,28. IPM Kabupaten Poso selama 10 tahun terakhir meningkat secara rata-rata sebesar 0,86 poin per tahun. Selama tahun 2012-2021, telah terjadi kenaikan IPM sebesar 5,25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa selama sembilan tahun terakhir pembangunan manusia di Kabupaten Poso secara umum mengalami peningkatan.

Pada tahun 2021, angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Poso telah mencapai 71,19. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata bayi yang lahir hidup pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 71,19 tahun atau 71 tahun 2 bulan. Dari sisi pendidikan dari indikator harapan lama sekolah, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Poso yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan formal selama 13,71 tahun atau setara dengan Diploma 2. Sedangkan secara rata-rata pendidikan yang ditempuh riil oleh penduduk Kabupaten Poso yang berusia 25 tahun ke atas adalah 9,5 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas 3 SMP). Pada aspek

ekonomi pengeluaran per kapita Kabupaten Poso mengalami penurunan yang berkontribusi pada penurunan angka IPM Kabupaten Poso di tahun 2021, nilainya sebesar Rp 8.850.000,- per kapita per tahun. Artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk Poso selama setahun setiap orangnya sebesar Rp 8.850.000,- di tahun 2021.



Sumber: BPS Kabupaten Poso

Gambar 3.1. Tren IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Poso Tahun 2012-2021

Kemajuan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari kecepatan pembangunan manusia sebagai cerminan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM.

Selama periode 2012-2021, IPM Kabupaten Poso rata-rata tumbuh sebesar 0,86 poin per tahun dengan nilai pertumbuhan yang masih positif kecuali pada tahun 2019-2020. Penurunan tersebut

disebabkan oleh menurunnya nilai pengeluaran riil perkapita. Menurunnya pengeluaran riil per-kapita diduga merupakan dampak dari wabah Covid-19. Namun, pada tahun 2021 sebagai dampak dari penanganan dan efek dari *new normal* pengeluaran riil per-kapita penduduk telah meningkat sehingga mampu mendongkrak capaian IPM. Selama kurun waktu 2012-2021, pertumbuhan IPM Kabupaten Poso fluktuatif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017.

3.2. STATUS IPM KABUPATEN POSO

Salah satu cara untuk melihat perkembangan manusia di suatu daerah adalah dengan mengetahui status pembangunan manusia pada daerah itu. Terjadinya perubahan status pembangunan manusia dapat menjadi indikator perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok yang dijabarkan pada bab 2.

Selama tahun 2012-2017, status pembangunan manusia di Kabupaten Poso telah berstatus “sedang” dikarenakan nilainya berada diatas level 60 dan dibawah level 70. Sejak tahun 2018, Kabupaten Poso telah berhasil meningkatkan statusnya memasuki level berstatus “tinggi”. Hal tersebut ditunjukkan oleh angka IPM Kabupaten Poso di tahun 2019 yaitu 71,4, di tahun 2020 71,28, dan IPM pada tahun 2021 yaitu 71,45. Dimana ketiga angka tersebut berada di antara rentang 70-80.

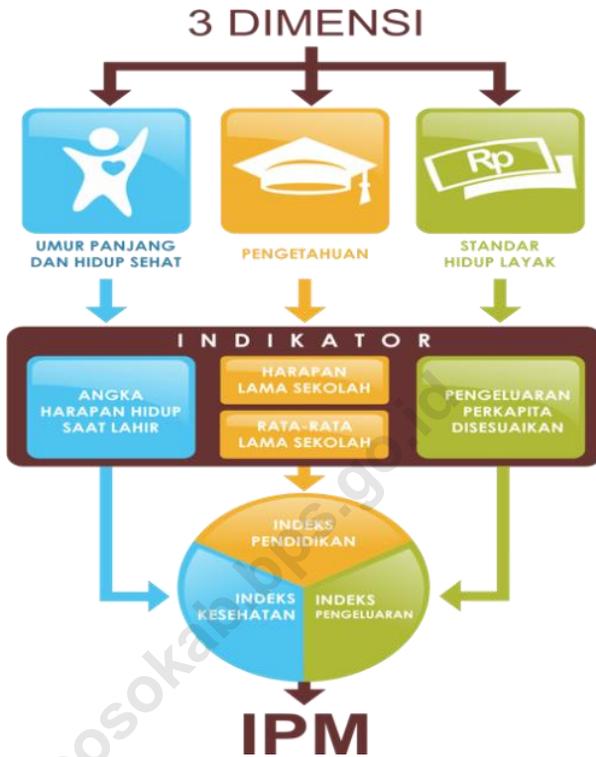
BAB 4

INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN POSO

4.1. INDEKS KESEHATAN

Pada tahun 1999, *The United Nations Development Programme* (UNDP) yakni organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan dunia, menciptakan alat ukur yang dinamakan *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan (IPM) yang digunakan banyak negara di dunia termasuk Indonesia. IPM dibuat dengan penekanan bahwa individu dengan kapabilitasnya mesti menjadi ukuran utama pembangunan suatu negara.

IPM merupakan ringkasan pencapaian rata-rata beberapa dimensi yakni: kehidupan yang sehat dan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, angka harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (EYS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (lihat gambar 4.1).



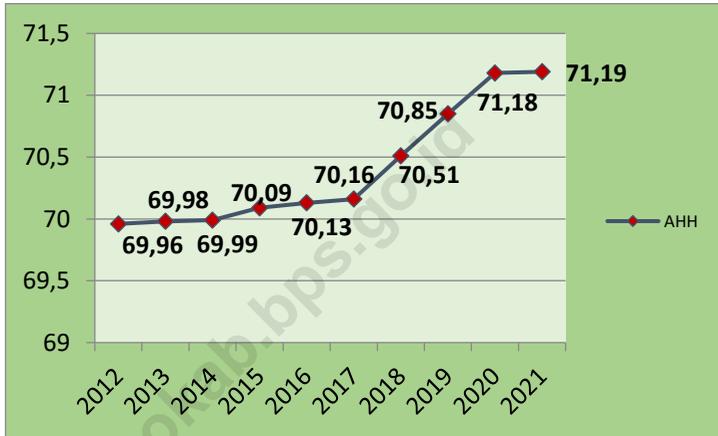
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Gambar 4.1. Indeks Penyusun IPM

Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Poso secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini juga mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Poso.

Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian

(mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun, sedangkan Umur Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.



Sumber: BPS Kabupaten Poso

Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Poso, 2012-2021

Gambar 4.2. di atas menunjukkan perkembangan AHH Kabupaten Poso selama periode 2012 hingga 2021. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Kabupaten Poso terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan AHH sebesar 1,23 poin. Pada tahun 2021, AHH di Kabupaten Poso adalah 71,19 tahun yang artinya harapan hidup bayi yang baru lahir di tahun itu untuk bertahan hidup adalah 71,19 tahun.

Peningkatan AHH selama sembilan tahun terakhir cukup baik. Utamanya pada lima tahun terakhir yang mampu meningkat sebesar 1,03 poin. Peningkatan AHH merupakan gambaran dari penurunan angka kematian di usia muda yang semakin dapat ditekan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui angka mortalitas yang tergambarkan dalam data ASDR (*Age Specific Death Rate*). Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan seiring dengan usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Poso di bidang kesehatan melalui indikator yang diukur dengan angka harapan hidup terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian BPJS PIB serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk belanja modal pengadaan gedung dan bangunan Rumah Sakit BLUD di RSUD Poso, rehab/berat pembangunan Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, dan lain-lain.

Upaya Pemerintah Kabupaten Poso dalam memberikan Program Jaminan Kesehatan melalui BPJS PBI diharapkan dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup sehat. Salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Poso di bidang kesehatan yang terus ditingkatkan adalah pembukaan puskesmas-puskesmas baru di beberapa wilayah sejak tahun 2018. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah serta tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2020-2021

Ada/tidak keluhan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2020			
Ada keluhan	17,64	17,06	17,36
Tidak ada	82,36	82,94	82,64
Total	100,00	100,00	100,00
2021			
Ada keluhan	7,24	11,73	9,43
Tidak ada	92,76	88,27	90,57
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Poso (Susenas 2021, diolah)

Sementara itu angka morbiditas adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk karena semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini

mengindikasikan masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada angka mortalitas dan umur harapan hidup.

Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2021, angka morbiditas penduduk Kabupaten Poso tahun 2021 adalah 9,43 persen. Angka tersebut turun jauh jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 17,36 persen (Tabel 4.1). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Poso semakin membaik dalam satu tahun terakhir.

Teori Henrik L. Blum juga menjelaskan bahwa tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjo dkk, 1997). Faktor lingkungan mempunyai pengaruh sebesar 45 persen, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan keturunan sebesar 5 persen.

Faktor lingkungan yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan berbagai aspek salah satunya adalah keadaan fasilitas sanitasi dimana seseorang tinggal dimasa kecilnya. Anak yang tinggal di dalam lingkungan yang sehat, maka lebih kecil kemungkinannya untuk sakit yang pada banyak kasus bahkan meninggal. Selanjutnya jika angka kematian bayi tinggi di suatu daerah maka usia harapan hidupnya akan

semakin rendah dan akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.



Sumber: BPS Kabupaten Poso (Susenas 2021, diolah)

Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Poso, 2021

Jika dilihat dari kondisi sanitasi rumah tangga di tahun 2021 sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 4.3, terdapat 92,14 persen rumah tangga di Kabupaten Poso yang sudah menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun, masih ada 7,86 persen rumah tangga yang membuang kotoran di tempat lainnya termasuk tempat terbuka. Keadaan ini dapat memudahkan tersebarnya virus atau bakteri penyebab penyakit.

Selain itu, faktor lingkungan juga dijelaskan melalui indikator persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2021 persentasenya terus menurun. Pada tahun 2021, rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang besar hanya sebesar 5,89 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,56 persen (Tabel 4.2).

Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat adalah perilaku sehat dan pelayanan kesehatan yang berdasarkan teori Henrik L. Blum masing-masing berkontribusi 30 persen dan 20 persen. Salah satu indikator dari perilaku sehat adalah perkawinan usia dini yang dapat berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2021 terdapat 9,35 persen wanita pernah kawin dengan umur kawin pertama \leq 16 tahun. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,03 persen (berkurang 1,68 persen). Penurunan tersebut menunjukkan perubahan yang baik mengingat pada tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan persentase wanita pernah kawin dengan umur kawin pertama \leq 16 tahun (Tabel 4.2).

Sementara itu, indikator pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan diantaranya persentase wanita pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan yang pada tahun 2021 jumlahnya sebesar 21,42 persen. Angka tersebut naik cukup signifikan dengan perubahan sebesar 8,03 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13,39 persen. Hal ini berbanding terbalik bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 9,94 persen untuk persentase wanita pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan (Tabel 4.2). Hal ini ditengarai karena di

masa pandemik Covid-19 banyak wanita yang melahirkan memilih melahirkan bukan di fasilitas kesehatan karena ketakutan akan penularan penyakit.

Secara umum dapat dikatakan beberapa indikator-indikator kesehatan yang bisa berdampak terhadap peningkatan umur harapan hidup di masa pandemi COVID-19 masih menunjukkan perbaikan meskipun ada juga yang mengalami perubahan signifikan yang berpengaruh pada perlembatan peningkatan AHH di tahun 2021. Peningkatan AHH turut memberikan peran yang positif pada peningkatan IPM di masa pandemi.

Tabel 4.2. Beberapa Indikator Kesehatan yang Terkait dengan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (persen), 2019-2021

No.	Indikator	Tahun			Selisih	
		2019	2020	2021	2020-2019	2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	6,56	5,89	8,75	-0,67	2,86
2.	Wanita Pernah Kawin dengan Umur Kawin Pertama \leq 16 tahun	11,03	9,35	26,95	1,34	-0,59
3.	Wanita Pernah Kawin yang Proses Melahirkan Terakhirnya Bukan di Fasilitas Kesehatan	13,39	21,42	1,36	8,03	-20,06

Sumber : BPS Kabupaten Poso (Susenas 2021, diolah)

4.2. INDEKS PENDIDIKAN

Peningkatan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen

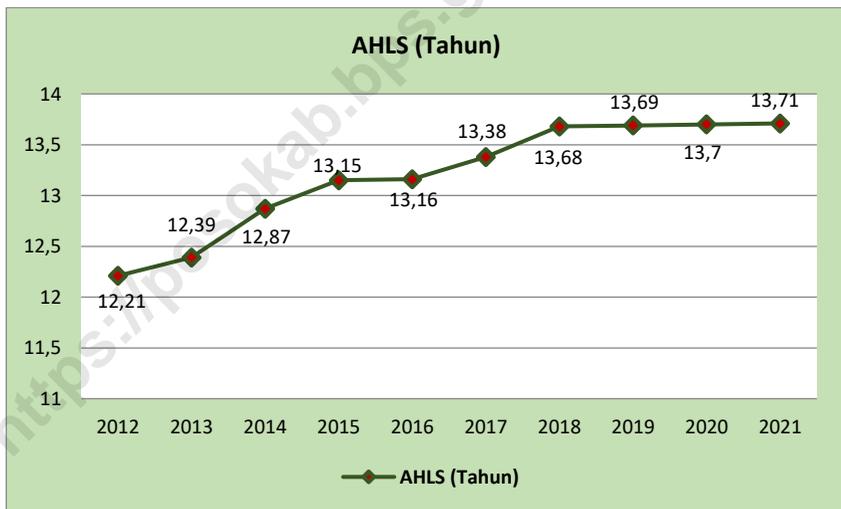
terpenting, yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian sehari-hari, pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Bangsa yang cerdas dapat menyadari pentingnya masa depan yang berisi tantangan-tantangan tetapi juga harapan kepada suatu kehidupan yang lebih baik, lebih tenteram dan lebih adil. Kecerdasan ini bersumber dari pendidikan.

Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS/*Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (HLS/*Expected Years of Schooling*).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2021, AHLS Kabupaten Poso mencapai 13,7 atau naik sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2020 (13,7). Gambar 4.4 merupakan tren AHLS Kabupaten Poso selama periode 2012 hingga 2021. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa AHLS Kabupaten Poso terus naik dari 12,21 tahun di 2012 menjadi 13,71 tahun 2021. Kenaikan cukup besar terjadi dari tahun 2016 hingga 2018, dan setelah itu melandai hingga 2021.



Sumber: BPS Kabupaten Poso

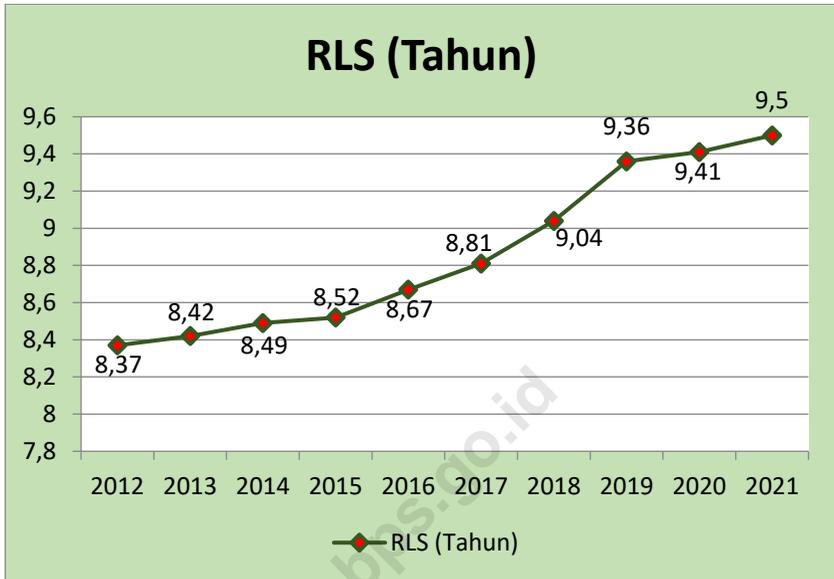
Gambar 4.4. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Poso (tahun), 2012-2021

Peningkatan angka HLS yang belum terlalu signifikan di beberapa tahun terakhir, memerlukan upaya yang berkaitan dengan

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Poso di bidang pendidikan, salah satu upaya peningkatan SDM tersebut adalah dengan lebih ditingkatkan kembali sosialisasi maupun bantuan daerah guna mendukung program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan utamanya di pendidikan menengah dan tinggi, dll. Pemerintah Kabupaten Poso perlu terus memperhatikan penduduknya agar yang telah mencapai perguruan tinggi pun bisa mendapat kesempatan yang baik untuk melanjutkan kuliah hingga tamat.

Di samping Harapan Lama Sekolah, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa RLS Kabupaten Poso terus mengalami kenaikan. Jika periode 2012 hingga 2015 kenaikan yang landai yakni sekitar 0,03 s.d. 0,07, tetapi pada tahun 2016 hingga 2019 kenaikan RLS di Poso berada di rentang 0,14 s.d. 0,32. Meski pada tahun 2021 mengalami perlambatan kenaikan yaitu hanya sebesar 0,05. Secara keseluruhan telah terjadi kenaikan RLS 1,04 tahun sepanjang periode 2012 hingga 2021.



Sumber: BPS Kabupaten Poso

Gambar 4.5. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun), 2012-2021

Rata-rata lama bersekolah (RLS) Kabupaten Poso di tahun 2021 mencapai angka 9,5 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Poso bersekolah hingga tiga SMP atau kelas satu SMU. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program pendidikan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan untuk masa depannya semakin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan di seluruh penjuru daerah Kabupaten Poso.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep '*link and match*', yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan jaman. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga seringkali menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang seharusnya belajar, namun terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan bahkan berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun yang dilaksanakan secara gratis. Program ini telah berjalan di Kabupaten Poso hingga saat ini, melalui pembiayaan APBD setiap tahun.

Pemerintah telah banyak melakukan program-program demi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Poso. Diantara upaya yang dilakukan setiap tahunnya adalah dengan merenovasi ruang-ruang kelas di berbagai jenjang, sekolah dasar khususnya. Selain itu, di tingkat Pendidikan tinggi saat ini direncanakan pembangunan kampus baru untuk Universitas Sintuwu Maroso.

Di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia termasuk di Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk berupaya bahwa pendidikan tetap menjadi bagian penting yang perlu segera beradaptasi dengan keadaan. Pemerintah memberikan bantuan berupa pulsa untuk para siswa di berbagai jenjang sekolah. Termasuk juga bantuan berupa PIP yang tetap diterima di berbagai jenjang pendidikan untuk membantu menopang biaya pendidikan yang harus dikeluarkan para orang tua di tengah pandemi.

Selain beasiswa yang disediakan oleh pemerintah berupa PIP, di Kabupaten Poso juga terdapat berbagai organisasi non pemerintah. Diantaranya adalah melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Poso Energy dan Bank BRI. Beasiswa diberikan untuk berbagai jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari pihak non pemerintah dalam membantu menyediakan pendidikan yang baik di Kabupaten Poso.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menunjukkan keseriusan dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan mewajibkan pendidikan 12 tahun dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan SMU/SMK. Seperti

halnya Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Poso juga sangat memperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan mencanangkan program Poso Cerdas. Hal ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD I Kabupaten Poso yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Dengan sasaran meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang professional, optimalisasi minat baca masyarakat, terjamin dan terpeliharanya anak jalanan, anak disabilitas mendapatkan pendidikan, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Berbagai program pendidikan subsidi secara merata ke seluruh sekolah dengan perhitungan yang sama telah digulirkan. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah menginginkan agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar dan menengah.

Tolak ukur umum dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan disuatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik gedung sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid guru. Hal ini terdapat pada Tabel 4.2. di bawah.

Tabel 4.2. Jumlah Sekolah di Kabupaten Poso, 2015-2021

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMU/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	240	81	41
2016	241	81	42
2017	242	82	42
2018	239	82	41
2019	242	82	42
2020	243	82	41
2021	244	84	41

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Poso

Selama tahun 2015-2021, terjadi perubahan jumlah sekolah baik pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah, maupun Atas. Penambahan sekolah-sekolah tersebut tentunya dalam rangka memenuhi pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Selain itu pembangunan sekolah juga dilakukan pada daerah yang selama ini berada cukup jauh dari sekolah yang sudah ada.

Indikator rasio murid-guru merupakan indikator yang penting menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Selain itu, dengan indikator ini dapat melihat bagaimana kondisi kegiatan belajar-mengajar berkaitan dengan perhatian guru terhadap murid.

Makin besar rasio murid-guru, maka semakin besar beban yang ditanggung tiap gurunya. Semakin besar murid yang ditanggung per gurunya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi proses belajar

mengajar. Hal ini dapat menuju makin rendahnya tingkat pengawasan /perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran pun makin rendah. Namun demikian, rasio yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Oleh sebab itu, beban mengajar seorang guru hendaknya mendekati batas kemampuan ideal. Menurut hasil beberapa penelitian, rasio murid-guru yang ideal agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif adalah 20, yaitu seorang guru menangani sekitar 20 orang murid untuk setiap kelas. Rasio murid-guru dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2020-2021

Jenjang Pendidikan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
SD	10,09	10,09
SMP	10,29	10,29
SMU	13,23	13,23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Poso dalam Kabupaten Poso Dalam Angka 2021

Pada tahun 2021, rasio murid guru masih memiliki pola yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu rasio terbesar adalah pada tingkat sekolah menengah umum yang meliputi SMA, SMK, dan MA. Angka ini makin menurun pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Namun secara proporsi pada tahun 2021 rasio jumlah murid terhadap guru mengalami penurunan, artinya seorang guru menangani jumlah murid yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Rasio jumlah murid guru hanya meningkat pada jenjang SMU. Pada tingkat SD,

sekitar 10-11 orang murid ditangani oleh seorang guru. Pada tingkat SMP, sekitar 10-11 orang murid ditangani oleh seorang guru. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMU, setiap 1 orang guru menangani sekitar 13-14 orang murid.

Sumber daya manusia suatu wilayah dapat dilihat salah satunya dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan ini adalah jenjang pendidikan yang berhasil ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan yang telah ditamatkan, maka semakin baik sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan dapat bersaing dalam dunia tenaga kerja dan menjadi pekerja ahli.

Selain jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, untuk melihat kualitas pendidikan di suatu daerah juga diperlukan indikator lain adalah partisipasi sekolah. Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, APK pada tingkat SD merupakan perbandingan jumlah murid di tingkat SD dengan jumlah penduduk yang berusia antara 7—12 tahun. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen. Nilai APK dapat mengukur seberapa besar daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan

pembangunan pendidikan dimana memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APM adalah persentase jumlah seluruh siswa usia pada suatu jenjang pendidikan tertentu dan berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, nilai APM tingkat SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa SMP yang berusia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun. Kebalikannya, nilai APM tidak bisa lebih dari 100 persen.

Nilai APM bertujuan mengukur berapa proporsi anak yang sekolah tepat waktu. Nilai APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai APK, karena nilai APM tidak mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Selisih dari keduanya (APK dengan APM) merupakan persentase siswa yang terlambat masuk sekolah ataupun yang terlalu cepat masuk sekolah.

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kabupaten Poso, 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2019	2021	2019	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	93,89	93.92	104,29	103.58
SMP/MTs	79,19	78.70	99,58	97.58
SMA/SMK/MA	68,16	69.49	93,36	91.87

Sumber : BPS Kabupaten Poso

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa daya serap jenjang SD memiliki angka tertinggi yakni 106,21 diikuti jenjang SMP, dan SMU. Besaran APK setiap jenjang pendidikan yang sudah di atas 70 persen menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di Kabupaten Poso sudah mampu menampung jumlah siswa sesuai dengan target. Pada indikator APK, kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan tidak terlihat secara jelas, karena bisa jadi ada siswa yang terlalu cepat atau justru terlambat memasuki bangku sekolah. Oleh karena itu APK masih merupakan ukuran kasar untuk melihat partisipasi sekolah. Untuk mendapatkan angka yang lebih tepat maka digunakanlah Angka Partisipasi Murni (APM).

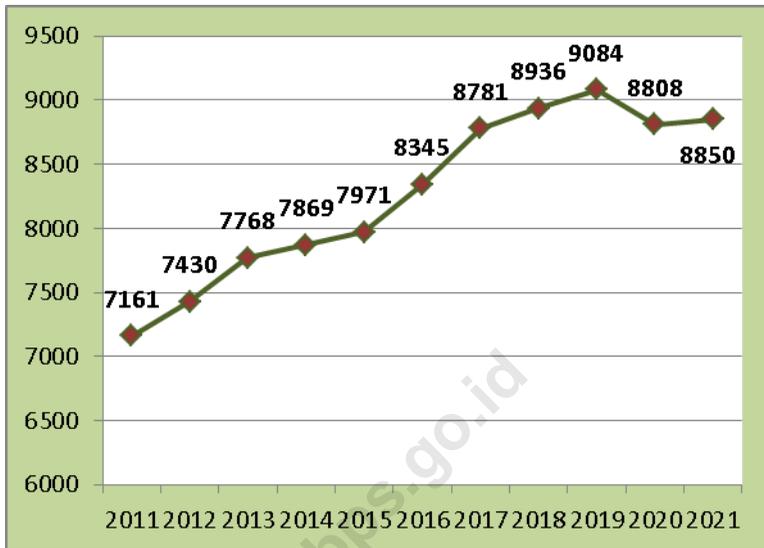
Tabel 4.5. terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD, nilai APM Kabupaten Poso adalah 93,92 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada siswa di tingkat SD yang berusia bukan pada rentang 7—12 tahun, yakni sekitar 6,08 persen yang kemungkinan lebih muda dari 7 tahun atau lebih tua dari 12 tahun. Begitu pula pada tingkat pendidikan SMP dan SMU, nilai APM Kabupaten Poso masing-masing adalah 78,70 persen dan 69,49 persen. Nilai APM Kabupaten Poso yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan namun tidak sesuai pada jenjang pendidikannya.

4.3. INDEKS PENGELUARAN

Kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat atau penduduknya. Semakin baik kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran atau pendapatan penduduknya. Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Rata-rata pengeluaran riil Perkapita merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Sejak tahun 2011 hingga 2021, rata-rata pengeluaran riil per kapita Kabupaten Poso hampir selalu meningkat setiap tahunnya. Meski sempat turun angkanya di tahun 2020, pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran riil per kapita Poso mulai merangkak naik kembali di level 8,85 juta rupiah. Angka ini memang belum sebanding dengan angka pada tahun 2019. Namun, angka tersebut masih naik sebesar 23,58% persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran riil per kapita Kabupaten Poso tahun 2011 (lihat Gambar 4.7).



Sumber: BPS Kabupaten Poso

Gambar 4.6. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Riil Per Kapita (000 rupiah) Kabupaten Poso, 2011-2021

Penurunan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global. Tahun 2021, masyarakat Indonesia masih terdampak oleh wabah Covid-19, namun kondisinya sudah lebih baik dan banyak apdatasi yang telah mampu diterapkan. Dengan keadaan tersebut mampu untuk mendorong kembalinya geliat perekonomian masyarakat sehingga pengeluaran per kapita penduduk pun meningkat meski belum signifikan. Peningkatan pengeluaran per kapita diantaranya juga didorong dengan adanya penyesuaian di berbagai di sektor yang mendorong kebutuhan sekunder dan tersier kembali meningkat.

Langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di sekitarnya sehingga mudah dijangkau.
2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga.
3. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Produktivitas, PDRB per kapita.
2. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.
3. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder.
4. Status pekerjaan.

Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan

daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu wilayah. PDRB tersebut dapat juga sebagai sarana untuk mengetahui sektor mana saja yang dapat dikembangkan serta mampu menampung tenaga kerja yang besar sehingga dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

Indikator yang dapat diturunkan dari besaran PDRB adalah struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan peranan nilai tambah bruto masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai PDRB. Peranan tersebut juga akan berimplikasi pada besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Perekonomian Kabupaten Poso secara lapangan usaha dari tahun ke tahun masih ditopang oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari Tabel 4.8.

Tabel 4.5. Struktur Perekonomian Kabupaten Poso 2021**

No	Lapangan Usaha	PDRB 2021	
		Nilai ADHK (juta rupiah)	Persentase Distribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.481.575,7	38,56
2.	Pertambangan dan Pengalihan	87.755,3	1,50
3.	Industri Pengolahan	96.098,7	1,61
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.887,7	0,03
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.301,0	0,08
6.	Konstruksi	678.594,5	11,59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	806.568,7	12,23
8.	Transportasi dan Pergudangan	198.025,7	3,33
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43.954,3	0,68
10.	Informasi dan Komunikasi	473.133,0	5,19
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	179.807,7	3,15
12.	Real Estate	175.401,5	2,63
13.	Jasa Perusahaan	2.151,2	0,03
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	635.163,4	9,39
15.	Jasa Pendidikan	451.422,2	6,45
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134.191,9	2,13
17.	Jasa Lainnya	71.752,9	1,41
	Total	6.523.785,2	100,00

** angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Poso

Kontribusi utama diberikan oleh lapangan usaha pertanian dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan bagi struktur perekonomian Kabupaten Poso. Selama periode 5 tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha ini secara rata-rata berkisar antara 37-39 persen dari total PDRB Kabupaten Poso. Meski trend kontribusinya menurun sejak tahun 2016, namun pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian justru mengalami peningkatan.

Kontribusi signifikan juga diberikan oleh kategori lapangan usaha konstruksi. Sejak 5 tahun terakhir, sektor konstruksi mengalami trend kenaikan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Poso dan menempati posisi ketiga sebagai penyumbang PDRB terbesar. Kenaikan sektor konstruksi utamanya didukung oleh pembangunan yang sedang dan masih dilakukan oleh PT. Bukaka dalam membangun PT. Poso Energy.

Indikator berikutnya yang dapat diturunkan dari nilai PDRB adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Poso terus mengalami kenaikan sepanjang tahun sejak tahun 2017. Namun, pada tahun 2021 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Poso tumbuh negatif dibanding tahun 2019. PDRB per Kapita dengan ADHK Kabupaten Poso Tahun 2017-2021 dapat di lihat pada Tabel 4.9. berikut ini.

Tabel 4.6. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Poso (ribu rupiah), 2017-2021

PDRB Per Kapita	2017	2017	2018	2020*	2021**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ADHK	23.351	24.278	25.373	25.491	26.269
Pertumbuhan ADHK	3,87	3,97	4,51	0,47	3,05

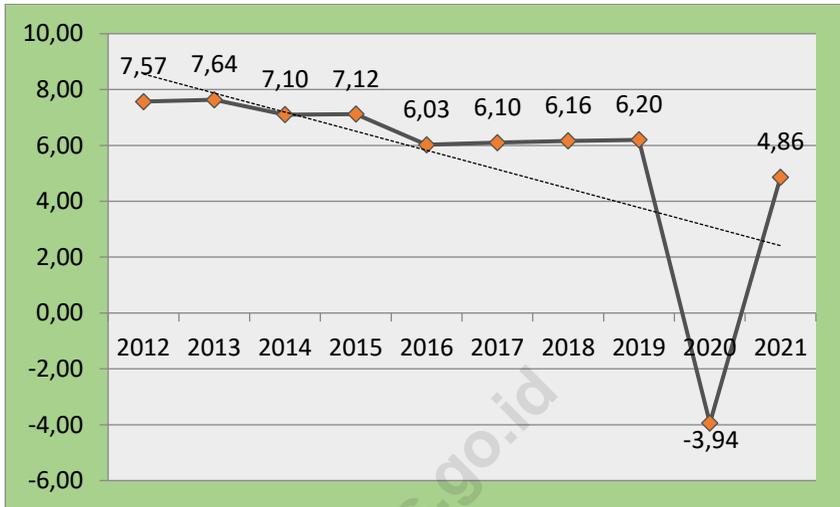
*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Poso

PDRB per kapita ADHK tahun 2021 hanya sebesar 26,27 juta per tahun per kapita naik 3,05 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 25,49 juta per tahun per kapita. Hal ini erat hubungannya dengan adanya pandemi Covid-19 yang sangat mengguncang perekonomian dunia dan mengakibatkan penurunan kinerja perekonomian secara agregat diberbagai daerah termasuk Kabupaten Poso.

PDRB merupakan indikator kinerja suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah. Oleh sebab itu, besaran nilai PDRB suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan faktor produksi dan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu indikator yang diturunkan dari PDRB adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.



Sumber: BPS Kabupaten Poso

Gambar 4.8. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Poso, 2012-2021 (persen)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso dengan menyertakan peran sektor migas selama periode 2012-2021 cenderung mengalami trend negatif. Meski pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 perekonomian cenderung meningkat lajunya. Di tahun 2020, sebagai akibat dari adanya pandemic Covid-19 yang mempengaruhi seluruh perekonomian dunia, pertumbuhan ekonomi Poso terkontraksi menjadi sebesar -3,94 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi baru mampu untuk kembali bangkir menjadi sebesar 4,86 persen. Grafik 4.8 menunjukkan bagaimana pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso selama periode 2012-2021.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada periode tertentu

dibandingkan dengan jumlah produksi barang dan jasa pada periode sebelumnya. Pertumbuhan yang positif menandakan terjadi kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan negatif menandakan terjadi penurunan produksi barang dan jasa.

Jika dilihat pertumbuhan PDRB Kabupaten Poso, terlihat bahwa mulai tahun 2016 ke 2017 peningkatan terjadi kembali. Menggeliatnya perekonomian Kabupaten Poso pada masa tersebut didukung oleh mulai beroperasinya PLTA Poso II PT Poso Energy. Serta secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya dengan adanya pembangunan PLTA Poso I dan III PT Poso Energy. Dimana pembangunan PLTA ini meningkatkan pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Poso. Selain itu, pemerintah Kabupaten Poso juga berkontribusi terhadap meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dibidang Administrasi Pemerintahan dengan meningkatnya belanja yang dilakukan pemerintah.

Pada tahun 2021, meskipun masih berkesulitan dengan berbagai permasalahan di masa pandemi namun geliat perekonomian mulai terjadi di berbagai wilayah termasuk di Poso. Beberapa lapangan usaha yang sempat berkontraksi tajam di tahun 2020 seperti Industri Pengolahan, Penyedia Makan dan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan mulai bangkit kembali di tahun 2021. Hal ini didukung dengan adanya berbagai penyesuaian yang dilakukan pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat dalam menghidupkan perekonomian di masa pandemi. Transportasi yang sempat mengalami banyak pembatasan pada tahun 2020 mulai menuju keadaan penyesuaian

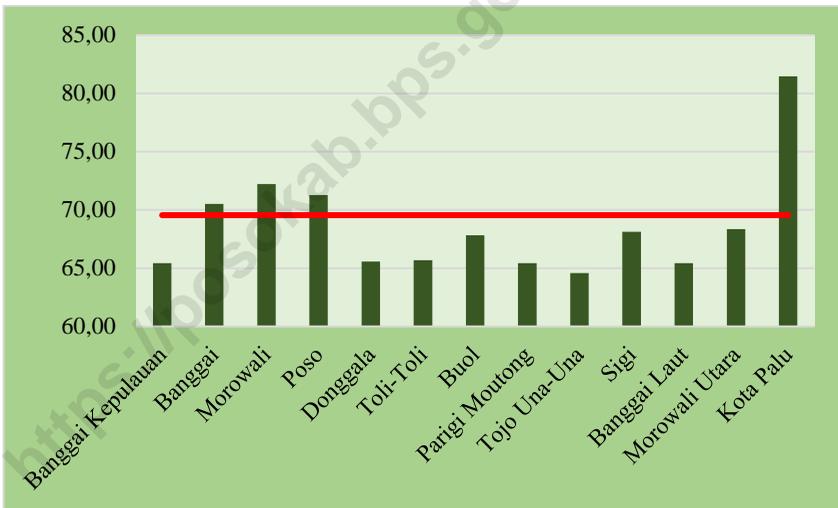
terutama di akhir tahun 2021. Selain itu, berbagai penyedia makan dan minum serta akomodasi yang sempat tutup di tahun 2020 mulai mampu membuka usahanya kembali dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Pada PDRB Pengeluaran pun sebagian besar kategori pengeluaran sudah mengalami peningkatan capaian di tahun 2021. Sehingga mengakibatkan PDRB tahun 2021 Kabupaten Poso secara agregat meningkat.

4.4. KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Membandingkan IPM antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi bukanlah untuk melihat memberi kesan negatif bagi daerah yang memiliki IPM yang lebih rendah. Namun, bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia di daerah-daerah yang dibandingkan tersebut. Tujuannya adalah agar semua daerah terus terpacu dalam meningkatkan kapasitas manusia di daerahnya masing-masing.

Secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam susunan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020. IPM dengan status sangat tinggi hanya diduduki oleh Kota Palu. IPM dengan status tinggi diduduki oleh Kabupaten Morowali, Banggai, dan Poso. Status IPM kategori sedang adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, dan Morowali Utara.

Pada tahun 2021, IPM Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan 0,24 poin dibanding tahun 2020. IPM Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 berada pada level 69,79. Pada tahun 2021, di Sulawesi Tengah hanya ada 4 kabupaten/kota yang level IPM nya lebih tinggi daripada Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Poso. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya memiliki capaian IPM kurang dari IPM Sulawesi Tengah. Perbandingan IPM kabupaten/kota digambarkan oleh Gambar 4.9 berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 4.9. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021

Jika membandingkan capaian IPM dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso patut berbangga. Sebab di tengah-tengah upaya pembangunan di masing-masing daerah, Kabupaten Poso

masih menjadi daerah ketiga tertangguh di Sulawesi Tengah dalam peringkat keberhasilan pembangunan manusianya. Tiap daerah tentunya tak akan pernah berhenti dalam memajukan kualitas penduduknya, tetapi ternyata Poso masih termasuk kategori yang tercepat dalam melakukannya.

Meskipun secara terpisah ada beberapa indeks yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Poso terutama pada pengeluaran per kapita. Utamanya pada tahun 2021, dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tertangkap fenomena bahwa terjadi penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena di masa pandemi banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang berpengaruh pada penurunan pengeluaran. Sehingga pemerintah pun sudah mengupayakan dan perlu meningkatkan kembali bantuan sosial pada masyarakat untuk membantu meningkatkan tingkat pengeluaran masyarakat. Serta memberikan insentif atau pelatihan pada masyarakat untuk bisa lebih mengembangkan diri untuk menambah penghasilan dari usaha yang dibangunnya sendiri.

Tapi mesti juga disadari bahwa pembangunan yang bervariasi antar Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah, tentunya memberikan gambaran pada kita bahwa masih terjadi ketidakmerataan perkembangan pembangunan di banyak sektor. Karena seperti yang kita tahu, walaupun IPM dihitung dari 3 dimensi sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, tetapi faktor-faktor

lain yang tidak masuk dalam perhitungan pastilah memberi pengaruh juga.

Tabel 4.7. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2021

Provinsi/Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Tahun /Kapita)				IPM
	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)		
(2)	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)
SULAWESI TENGAH	68.83	13.23	8.89	9,378	69.79
Banggai Kepulauan	66.59	13.07	8.44	7,453	65.61
Banggai	70.88	13.25	8.53	9,603	70.60
Morowali	69.23	13.35	9.34	11,028	72.29
Poso	71.19	13.71	9.50	8,850	71.45
Donggala	67.50	12.51	7.98	8,002	65.72
Toli-Toli	66.18	12.89	8.76	7,947	66.30
Buol	69.05	13.10	9.08	7,974	68.25
Parigi Moutong	64.35	12.48	7.74	9,675	65.82
Tojo Una-Una	65.90	12.29	8.40	7,621	64.74
Sigi	70.09	12.88	8.82	8,171	68.49
Banggai Laut	65.67	12.96	8.63	7,707	65.65
Morowali Utara	69.71	12.25	8.72	8,890	68.48
Kota Palu	71.09	16.28	11.72	14,894	81.70

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sehingga dengan publikasi analisis pembangunan manusia ini, akan membuka cakrawala berpikir kita bahwa pembangunan manusia masih merupakan tugas berat yang harus dilakukan dan diperjuangkan. Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah di masing-masing daerah terutama di daerah dengan IPM yang masih di bawah 66 (menengah

bawah). Semoga pemerataan pembangunan terus terjadi, sehingga dampak pembangunan yang sesungguhnya bisa dirasakan seluruh masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

<https://posokab.bps.go.id>

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan (BPS). Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang diperoleh melalui proses pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai subsistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Makin beragam kegiatan masyarakat makin besar pula kemampuan mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) atau Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) di tingkat Nasional, dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso Tahun 2021 adalah:

1. Angka IPM pada tahun 2021 mengalami perubahan metodologi penghitungan, alasannya adalah (1) beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan serta PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, (2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2. Melalui penghitungan IPM metode baru, Kabupaten Poso menjadi daerah di Sulawesi Tengah nilai IPM yang cenderung meningkat. Selama periode tersebut IPM Kabupaten Poso telah naik dari 66,20 di tahun 2012 menjadi 71,45 di tahun 2021 atau naik sebesar 5,25 poin.
3. Seluruh komponen IPM Kabupaten Poso di tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020, kecuali pada pengeluaran perkapita. Peningkatan AHH, AHLS, RLS, dan Pengeluaran perkapita masing-masing sebesar 0,01 tahun, 0,01 tahun, 0,09 tahun, dan 42.000. Kenaikan semua indikator bisa menjadi indikasi bahwa pembangunan di Kabupaten Poso di bidang kesehatan dan pendidikan berjalan dengan baik, sedangkan penurunan angka indikator ekonomi mengindikasikan turunnya pembangunan di bidang perekonomian.
4. Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Poso menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kabupaten Poso yang makin baik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.
5. Di bidang pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Poso mencapai nilai sebesar 13,71 tahun. Angka ini mengandung makna bahwa dari seluruh penduduk Kabupaten Poso berusia 7 tahun ke atas, mempunyai harapan lama sekolah

13 tahun 8 bulan. Angka ini setingkat semester 3 atau 4 pada perguruan tinggi. Hal tersebut dapat terwujud antara lain karena adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Poso yang membebaskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SMU. Implikasi lainnya adalah rata-rata lama sekolah Kabupaten Poso yang terus meningkat hingga mencapai 9,50 tahun pada tahun 2021. Dengan kata lain, secara rata-rata penduduk Kabupaten Poso telah menempuh pendidikan 9 tahun 6 bulan lebih atau rata-rata setingkat kelas 3 SMP/MTs.

6. Di bidang ekonomi terjadi penurunan pendapatan penduduk. Hal itu dapat dilihat pada kenaikan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran riil per kapita Kabupaten Poso adalah sebesar 8,808 juta rupiah, kemudian turun menjadi 8,850 juta rupiah di tahun 2021.
7. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso di tahun 2021 meningkat sebesar 0,17 poin dari tahun lalu yang hanya sebesar 71,28 menjadi 71,45.

5.2. SARAN

Capaian IPM Kabupaten Poso di tahun 2021 masih mengembirakan dengan status tinggi. Kabupaten Poso unggul dalam pencapaian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan angka harapan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh signifikan dari menurunnya pengeluaran per kapita perlu menjadi perhatian dari banyak pihak. Meskipun di era yang sulit karena terjadinya penurunan

pendapatan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran. Perlu adanya diversifikasi kemampuan dan peningkatan etos kerja guna meningkatkan taraf pendapatan masyarakat.

Capaian IPM Kabupaten Poso dalam bidang kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup (AHH) masih terus berada di urutan terbaik se-provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun sudah cukup tinggi, tetapi gerakan-gerakan untuk meningkatkan usia hidup seseorang perlu terus di lakukan. Tentunya tidak hanya berumur panjang tetapi juga sehat dan bisa aktif dalam masyarakat. Peningkatan AHH merupakan keberhasilan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR). Semakin rendah IMR maka AHH akan semakin tinggi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan IMR adalah menjaga kesehatan lingkungan, sanitasi, kualitas sumber air, dan perilaku hidup bersih. Selain itu penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Upaya tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran di masyarakat pentingnya kesehatan untuk masa depan yang lebih baik.

Meningkatnya angka harapan hidup juga menjadi tantangan bagi Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas yang ramah pada usia lanjut. Sehingga peningkatan AHH tidak dianggap menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Sebagaimana di sebutkan pada bagian sebelumnya gerakan investasi/menabung di masa muda harus menjadi kebiasaan, sehingga pada masa tua bisa hidup mandiri secara ekonomi dan tidak lagi terlalu tergantung pada orang lain. Ketersediaan tempat tinggal yang layak huni dan sanitasi yang bersih perlu ditingkatkan lagi untuk mendukung program masyarakat Kabupaten Poso yang sehat.

Di bidang pendidikan, perlunya perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). RLS Kabupaten Poso telah berada di urutan kedua diantara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah namun levelnya masih jauh dengan angka harapan lama sekolah. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya kebijakan pemerintah terkait tersedianya sarana prasarana sekolah yaitu tingkat Perguruan Tinggi yang masih terbatas pilihannya untuk meningkatkan RLS tersebut. Serta masih perlunya edukasi pada masyarakat bahwa pendidikan memiliki sumbangsih penting dalam meningkatkan taraf pembangunan manusia.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun tidak berarti anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas pertumbuhan tersebut, sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. https://ipm.bps.go.id/assets/files/booklet_ipm.pdf. Diakses tanggal 10 November 2021.
- Badan Pusat Statistik (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. Jakarta: BPS.
- United Nations Development Programme (1990). *Human Development Report 1990*. Washington DC, USA: UNDP.
- United Nations Development Programme (2015). *Human Development Report 2015*. Washington DC, USA: UNDP.
- Indeks Pembangunan Manusia*
<http://digilib.unila.ac.id/6034/15/BAB%20I.pdf>
<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN POSO**

JL. Pulau Kalimantan No. 52
Telp. (0452) 21695 Fax. (0452) 22929
Email. bps7204@bps.go.id